

# IMPLEMENTASI PROGRAM BLOOD JEK DI UTD PMI KABUPATEN LUMAJANG

**Roviyanti Razalia**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[rovirazalia2020@gmail.com](mailto:rovirazalia2020@gmail.com)

**Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

## Abstrak

Salah satu alternatif penanggulangan distribusi darah di Kabupaten Lumajang, UTD PMI Kabupaten Lumajang menjalankan program Blood Jek. Program Blood Jek adalah sistem layanan yang dirancang untuk menjamin kualitas darah, menjaga keualitas darah, dan memudahkan permintaan darah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan adalah variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sudah cukup baik dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana program kepada kelompok sasaran, kejelasan informasi belum cukup baik karena ketidaklengkapan identitas pasien pada form permintaan darah. Sedangkan untuk konsistensi materi sudah cukup konsisten. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Blood Jek masih kurang dalam segi jumlah petugas Blood Jek. Fasilitas atau sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Blood Jek masih kurang baik. Untuk aspek disposisi, sikap implementator program Blood Jek sudah cukup baik, dan adanya insentif yang diberikan kepada implementator juga sudah baik. Sedangkan dalam pelaksanaan program Blood Jek sudah sesuai dengan SOP. Saran dari peneliti yaitu penambahan petugas Blood Jek, penambahan fasilitas sarana sepeda motor dalam layanan program Blood Jek, perbaikan prasarana gedung agar lebih luas dalam pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci : Implementasi, Distribusi, Darah.

## Abstarct

One alternative for the control of blood distribution in Lumajang Regency, UTD PMI Lumajang Regency runs the Blood Jek program. The Blood Jek program is a service system designed to guarantee blood quality, maintain data quality, and facilitate blood demand. In its implementation, the community and the Hospital understood enough about the Jek Blood program but the lack of blood delivery officers in the Jek Blood program, the number of facilities and infrastructure lacking in the implementation of the Blood Jek program at UTD PMI Lumajang Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of the research used is variable communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that the information provided by program implementers was sufficiently good for the target group, information clarity was not good enough because of the incompleteness of the patient's identity on the blood request form. As for the consistency of the material is quite consistent. Human resources in implementing the Blood Jek program are still lacking in terms of the number of Blood Jek officers. Facilities or facilities and infrastructure in the implementation of the Blood Jek program are still not good. For the disposition aspect, the attitude of the Blood Jek program implementer was quite good, and the incentives provided to the implementers were also good. While the implementation of the Blood Jek program is in accordance with the SOP. Suggestions from researchers were the shooting of the Jek Blood Officer, adding motorcycle facilities in the Blood Jek program service, improving building infrastructure to make it wider in the implementation of the Blood Jek program at UTD PMI Lumajang Regency.

Keywords: Implementation, Distribution, Blood.

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah, dalam pasal 1 telah dijelaskan bahwa: “Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.” Transfusi darah merupakan proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 disebutkan bahwa Unit Transfusi Darah atau seringkali disingkat UTD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Menurut pasal 33 PMK No. 83 Tahun 2014, kegiatan pendistribusian darah dari UTD ke rumah sakit hingga diterima pasien harus dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin.

- Sistem distribusi tertutup merupakan sistem pendistribusian darah yang harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah sakit tanpa melibatkan keluarga pasien,
- Sistem rantai dingin merupakan sistem penyimpanan, distribusi darah dan produk darah dalam suhu dan kondisi yang tepat dari tempat pengambilan darah pendonor sampai darah ditransfusikan ke pasien.

Untuk menjamin kegiatan pelayanan transfusi darah berjalan dengan optimal maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Transfusi Darah Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Standart Pelayanan Transfusi Darah bertujuan menjamin pelayanan darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup.” Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) ini untuk menjamin kualitas darah yang memenuhi stok keberadaan darah, kecukupan darah, ketersediaan darah, keamanan darah dan untuk mengurangi jumlah kematian.

Selain jumlah kekurangan kantong darah yang belum terpenuhi, ada beberapa faktor yang membuat pelayanan transfusi darah tidak maksimal, salah satunya adalah rantai pasok darah, yaitu ketidakcocokan jumlah pasokan darah dengan jumlah permintaan darah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kasus dimana Negara Indonesia kekurangan 1 juta kantong darah tiap tahunnya.

Pentingnya ketersediaan kantong darah yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan transfusi darah yang dapat terjadi kapan saja seperti untuk korban kecelakaan dalam kondisi gawat darurat yang

membutuhkan transfusi darah, pasien operasi seperti operasi jantung, bedah perut, seksio sesarea, para penderita penyakit darah seperti talasemia, sedangkan akibat buruk kurangnya ketersediaan kantong darah dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi penyediaan darah dan pendistribusian darah yang merupakan proses dari pelayanan transfusi darah. Pendistribusian darah sendiri merupakan penyampaian darah siap pakai untuk keperluan transfusi darah dari Unit Transfusi Darah ke Rumah Sakit atau instansi kesehatan yang berwenang.

Salah satu kabupaten yang tidak terlepas dari kasus pelayanan distribusi darah adalah Kabupaten Lumajang. Dalam pelaksanaan pelayanan transfusi darah di Kabupaten Lumajang, terutama pada proses permintaan dan pendistribusian darah, ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu :

- Diperlukan waktu 3 jam untuk mendapatkan darah yang dibutuhkan karena darah ini dipesan dan dibawa sendiri oleh keluarga pasien dari UTD PMI ke rumah sakit.
- kendala sarana transportasi keluarga pasien, terutama saat malam hari seringkali darah rusak saat tiba dirumah sakit sehingga tidak memberikan jaminan kualitas darah, suhu tidak terkontrol, alat dan cara distribusi yang tidak sesuai dengan standar pelayanan darah.

Dari permasalahan diatas maka UTD PMI Kabupaten Lumajang membuat program untuk menangani masalah, program tersebut bernama Blood Jek. Blood jek merupakan sistem layanan yang dirancang khusus menjamin kualitas darah, memudahkan permintaan darah oleh keluarga pasien serta mendukung sistem layanan Rumah Sakit agar tetap berjalan optimal oleh UTD PMI Kab Lumajang. Sistem layanan Blood Jek yang digunakan adalah “permintaan langsung antar” maksudnya, keluarga pasien yang melakukan permintaan darah dengan membawa formulir permintaan dan sampel darah, lalu ke bagian administrasi di UTD PMI.

Dalam penerapan programnya, Blood Jek menggunakan kendaraan roda dua dilengkapi dengan box besar di bagian belakang, dapat diisi dua coolbox kecil sebagai tempat penyimpanan darah. Masing-masing coolbox dilengkapi thermometer digital untuk mengontrol suhu simpan darah sesuai dengan jenis produk darah yang dibawa. Formulir kontrol suhu darah selama perjalanan ke rumah sakit selalu tersedia di

coolbox. Implementasi program Blood Jek masih menemui beberapa hambatan. Hambatan yang ditemukan di lapangan diantaranya adalah :

- Minimnya jumlah tenaga pengantar darah yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan darah,
- Minimnya jumlah sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan darah,
- Identitas masyarakat/pasien yang menggunakan layanan Blood Jek tidak lengkap pada form permintaan darah.

Hal tersebut mempersulit proses pelaksanaan Blood jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang. Blood Jek telah diputuskan sebagai sarana distribusi darah Kabupaten Lumajang yang disahkan melalui Surat keputusan Kepala UTD PMI Kabupaten Lumajang Nomor 008/02.06.33/UTD/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang pelayanan distribusi darah. Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam sebuah judul penelitian yakni **“Implementasi Program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang”**

## METODE

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Soewadji (2012:17). Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari suatu objek penelitian. Karena luasnya masalah maka perlu batasan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang dalam penelitian kualitatif disebut fokus (Sugiyono, 2015:207). Penjelasan mengenai Implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang menggunakan model teori implementasi dari George C. Edward III dalam Subarsono (2015: 90-92):

1. Komunikasi,
2. Sumber daya,
3. Disposisi,
4. Struktur Birokrasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi Mardalis (2009:64) . Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono (2014:1) dengan bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif*, ketiga teknik tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Pemerintah sebagai pengambil keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai isu yang paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluralis Dye dalam Sugandi (2011:73). Di dalam Implementasi Blood Jek masalah yang timbul adalah jumlah tenaga pengantar darah yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan darah, jumlah sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan darah, dan identitas masyarakat atau pasien yang menggunakan layanan Blood Jek tidak lengkap pada form permintaan darah. UTD PMI Kabupaten Lumajang berinovasi dengan mengeluarkan progrsm yang bernama Blood Jek yang bertujuan untuk menjamin kualitas darah agar tetap aman sampai tujuan sehingga bisa memperhatikan pengontrolan suhu darah, dan pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Lumajang.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses mencapai tujuan dan untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan tersebut Santosa (2012:41). Merujuk pada hasil penelitian yang telah didapat pada program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang maka dapat dilakukan analisis implementasi Program Blood dideskripsikan berdasarkan empat variabel yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Unsur-unsur implementasi kebijakan yang terdapat dalam Tachjan (2006:56) yaitu: 1) unsur pelaksana 2)Program yang dilaksanakan 3) Kelompok sasaran

Untuk mengkaji Implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang peneliti menggunakan model teori George C. Edward III dengan empat variabel yaitu:

### 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*). Dalam hal ini Program Blood Jek telah diputuskan sebagai sarana distribusi darah Kabupaten Lumajang yang disahkan melalui Surat keputusan Kepala UTD PMI Kabupaten Lumajang Nomor 008/02.06.33/UTD/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang pelayanan distribusi darah. Program Blood Jek digagas sendiri oleh para staff UTD PMI Kabupaten Lumajang.

Informasi mengenai pelaksanaan program Blood Jek disampaikan oleh pelaksana kebijakan yaitu pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang kepada Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Lumajang,

dan masyarakat Kabupaten Lumajang. Penyampaian informasi yang dilakukan pelaksana kebijakan yaitu UTD PMI Kabupaten Lumajang kepada Rumah Sakit yang bekerja sama dan masyarakat Kabupaten Lumajang agar mengetahui serta memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan. Selain itu pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan program Blood Jek supaya apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang, pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang berupaya untuk menyampaikan informasi tentang program Blood Jek tersebut kepada pihak yang terkait yaitu Rumah Sakit di Kabupaten Lumajang dan masyarakat Kabupaten Lumajang melalui sosialisasi, sedangkan informasi yang disampaikan untuk pihak-pihak yang terlibat bekerjasama dalam kegiatan program Blood Jek dapat dilakukan sosialisasi secara langsung yaitu mendatangi satu persatu pihak atau instansi yang terlibat tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa transmisi atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan program Blood Jek sudah cukup baik sehingga pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pelaksanaan Program Blood Jek lebih tepat sasaran atau target.

Terkait kejelasan informasi pada pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang diketahui bahwa dalam implementasinya informasi yang disampaikan tergantung kepada siapa, jika kepada stekholder pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang menyampaikan tentang pentingnya investasi Bangsa tentang kesehatan, tetapi kalau sosialisasi bukan ke stekholder menyampaikan apa itu Program Blood Jek, bagaimana pelayanan darah yang baik, distribusi darah yang aman dan berkualitas, tujuan program blood jek, dan bagaimana pelaksanaannya. Dalam kejelasan informasi pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang ada kendala yaitu mengenai kejelasan informasi kepada pihak Rumah Sakit yang bekerja sama dengan UTD PMI Kabupaten Lumajang tentang Identitas pasien yang tidak lengkap pada form permintaan darah.

Pada sub indikator selanjutnya yaitu konsistensi, diketahui bahwa konsistensi pedoman yang digunakan adalah SOP (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan program Blood Jek. Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan program Blood Jek adalah SOP tentang *Drooping* Darah dan Penyerahan Darah yang tetap konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai dengan SOP. Sedangkan Landasan Hukum untuk program Blood Jek memakai SK (Surat Keputusan) tentang pelayanan distribusi darah yang dikeluarkan dan

disahkan oleh Kepala UTD PMI Kabupaten Lumajang Bapak Dr. Halimi Maksum, MMRS. Adapun MOU kerjasama untuk setiap Rumah Sakit yang bekerja sama dengan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

## 2. Sumber Daya

Faktor sumber daya menjadi salah satu indikator yang turut mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sebaik apapun penyampaian komunikasi antara implementator kepada kelompok sasaran, jika tidak ditunjang dengan adanya sumber daya yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Terdapat tiga sub indikator yang akan dibahas dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang, yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Fasilitas.

Dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang sumber daya manusia yang dimaksud adalah petugas program Blood Jek. Dalam hal kualitas sumber daya, jumlah petugas program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang hanya tiga orang dengan pembagian shift pagi, sore, dan malam. Dimana jumlah sumber daya manusia yang hanya tiga orang itu saja tidak sebanding dengan jumlah permintaan darah di UTD PMI Kabupaten Lumajang. Dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia, petugas pengantar darah program Blood Jek UTD PMI Kabupaten Lumajang merasa kesusahan jika ada Rumah Sakit yang bersamaan meminta kiriman kantong darah. Mengenai sub indikator sumber manusia tidak adanya kualifikasi tertentu untuk proses rekrutmen untuk petugas pengantar darah program Blood Jek, sehingga untuk sumber daya manusia dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang untuk indikator sumber daya manusia yang berkompeten belum terpenuhi.

Sub indikator selanjutnya adalah sumber daya anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang anggaran yang digunakan untuk implementasi program Blood Jek berasal dari Kas UTD PMI Kabupaten Lumajang dengan jumlah total sebesar Rp. 55,950,000.00. Selanjutnya, program Blood Jek juga dapat anggaran bantuan dari PMI Provinsi Jawa Timur ditahun 2016 saja berupa satu unit sepeda motor dan perlengkapan Blood Jek sebesar Rp 23.000.000,00. Sumber daya anggaran sudah cukup baik untuk mencapai tujuan adanya program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya adalah sumber daya fasilitas, dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang sumber daya fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan program Blood Jek. Sumber daya fasilitas untuk sarana

program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang adalah sepeda motor yang dilengkapi dengan box besar di bagian belakang, dapat diisi dua cool box kecil sebagai tempat penyimpanan darah. Masing-masing cool box dilengkapi thermometer digital untuk mengontrol suhu simpan darah sesuai dengan jenis produk darah yang dibawa. Sepeda motor dan fasilitas pendukung tersebut masih kurang atau tidak sebanding dengan jumlah permintaan darah yang diminta oleh Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Lumajang. Adapun prasarana yaitu berupa gedung untuk mendukung jalannya implementasi program Blood Jek.

Sumber daya fasilitas prasarana dalam mendukung pelaksanaan program Blood Jek adalah gedung, keadaan gedung di UTD PMI Kabupaten Lumajang dikatakan kurang luas. Seharusnya untuk ruangan-ruangan seperti ruang administrasi, ruang pelayanan pendonor, ruang laboratorium, ruang penyimpanan darah, ruang distribusi darah, ruang pertemuan, dan kamar mandi atau WC memiliki ruangan yang luas. Tersedianya ruang di UTD PMI Kabupaten Lumajang yang kurang luas tetapi masih layak untuk digunakan dan ditempati menunjukkan sub indikator sumber daya fasilitas yang kurang baik untuk kegiatan layanan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan indikator sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan pada sub indikator sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di UTD PMI Kabupaten Lumajang masih kurang. Namun pada sub indikator sumber daya anggaran cukup baik karena mendapatkan bantuan meskipun itu satu kali saja. Pada sumber daya fasilitas sarana dan prasarana masih kurang, hal tersebut dibuktikan bahwa masih kurangnya sarana sepeda motor untuk layanan pengantar darah dalam program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang, dan prasarana yang kurang juga meskipun cukup layak, karena membutuhkan gedung yang luas agar pelaksanaan program Blood Jek bisa berjalan dengan maksimal.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi terdiri dari dua sub indikator yaitu sikap dan insentif. Berdasarkan hasil penelitian, sikap yang ditunjukkan oleh pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang dalam implementasi program Blood Jek yaitu mendukung penuh pelaksanaan program Blood Jek, tujuan dari program tersebut yaitu untuk pemenuhan kebutuhan darah yang berkualitas sehingga dapat dinikmati di semua elemen masyarakat dengan menggratiskan biaya antar darah, dan kerusakan darah hampir tidak ada

karena pendistribusian darah sesuai dengan SOP yang berlaku di UTD PMI Lumajang.

Sikap petugas Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan program sudah baik dan positif terutama dalam hal keramahan, memberi penjelasan tentang Blood Jek terhadap masyarakat yang bertanya, dan selalu teliti dalam hal pengontrolan dan keamanan darah yang dibawa ke Rumah Sakit yang bekerja sama dengan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

Sikap yang positif dalam implementasi kebijakan perlu juga didukung dengan insentif yang layak. Insentif dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah cukup layak. Petugas pengantar darah dalam program Blood Jek digaji perbulan sesuai dengan status pegawai dan pendidikannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta dikaitkan dengan model implementasi Goerge C. Edward III mengenai indikator Disposisi, maka dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi sudah cukup baik. Pelaksana kebijakan memberikan dukungan penuh dalam implementasi Program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang. Dalam hal insentif dapat dikatakan sudah cukup baik karena gaji yang diterima setiap bulan sesuai dengan status pegawai dan pendidikannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup *Standard Operating Procedures* (SOP) yang akan memudahkan tindakan dari pelaksana dan juga fragmentasi atau pembagian tugas yang jelas kepada para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang, pedoman pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang telah berjalan sesuai dengan SOP. SOP pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang ada dua yaitu tentang *Drooping* darah dan Penyerahan Darah.

Fragmentasi atau pembagian tugas dan wewenang dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah cukup baik. Pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dalam pemangku kepentingan mengenai pembagian dalam implementasi program Blood Jek dimulai dari tingkatan instansi yang paling tinggi yaitu UTD PMI Kabupaten Lumajang, dan ada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan layanan program Blood Jek. Untuk memantau perkembangan program Blood Jek dan mengevaluasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang menggunakan cara yaitu dengan manajemen *komplain*, *survey*

pelanggan, dan saran terhadap layanan yang bisa dikirim melalui contact person atau langsung dikasih ke petugas layanan Blood Jek.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan indikator struktur birokrasi oleh Goerge C. Edward III, maka imolementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang sudah cukup baik karena SOP yang digunakan sudah cukup jelas. Dalam hal pembagian tugas dan wewenang juga sudah cukup baik. Pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana kegiatan telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Bukan hanya itu, program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten lumajang diadakan evaluasi setiap enam bulan sekali agar bisa mengetahui dan mengontrol bagaimana pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan, implementasi kebijakan, implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang telah dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan oleh Goerge C. Edward III yang memiliki empat indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi dalam implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang telah dilakukan oleh pihak UTD PMI Kabupaten Lumajang melalui sosialisai secara langsung, media elektronik (siaran radio), media cetak (Koran, pemasangan baliho atau banner), dan melui event yang diadakan tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dari tiga sub indikator yang ada dalam variabel komunikasi pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dilihat dari sub indikator transmisi dan kejelasan dalam penyampaian informasi cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sosialisasi dari UTD PMI Kabupaten Lumajang yang diterima oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat Kabupaten Lumajang dan pihak Rumah Sakit Negeri maupun Swasta di Kabupaten Lumajang. Pada sub indikator konsistensi juga sudah berjalan dengan cukup baik karena instruksi mengenai pelaksanaan program Blood Jek sesuai dengan SOP tentang Drooping darah dan Penyerahan Darah yang menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, adanya penguat Landasan Hukum yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala UTD PMI Kabupaten Lumajang.

Implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dilihat dari sub indikator sumber daya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa pada sub indikator sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di UTD

PMI Kabupaten Lumajang masih kurang. Kemudian untuk sumber daya anggaran sudah berjalan cukup baik. Anggran yang digunakan untuk pelaksanaan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang berasal dari Kas UTD PMI Kabupaten Lumajang dan anggaran bantuan dari PMI Provinsi Jawa Timur. Pada sub indikator yang ketiga yaitu, sumber daya fasilitas di UTD PMI Kabupaten Lumajang dalam implementasi program Blood Jek berjalan kurang maksimal. Hal ini dibuktikam bahwa kurangnya sarana sepeda motor yang dipakai dalam melaksanakan program Blood Jek, dan prasarana yaitu gedung yang kurang luas dimana tidak memenuhi strandart luas bangunan yang tertera di PMK RI Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

Indikator selanjutnya yang digunakan dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang adalah disposisi. Pada indikator ini sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan yaitu UTD PMI Kabupaten Lumajang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan program Blood Jek, dan petugas pengantar darah dalam program Blood Jek sangat ramah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sub indikator sikap telah terpenuhi dengan baik. Begitu pula dalam sub indikator insentif dalam pelaksanaan kegiatan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang sudah cukup baik karena setiap bulan para pegawai mendapatkan gaji sesuai dengan status pegawai dan pendidikannya.

Struktur birokrasi menjadi indikator terakhir yang digunakan dalam menganalisis imolementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang. Pada indikator tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang berjalan cukup baik sesuai dengan SOP yang ada. Dalam hal fragmentasi atau pembagian tugas dan wewenang juga sudah berjalan cukup baik. Dalam pemangku kepentingan mengenai pembagian dalam implementasi program Blood Jek dimulai dari tingkatan instansi yang paling tinggi yaitu UTD PMI Kabupaten Lumajang, dan ada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan layanan program Blood Jek. Kegiatan evaluasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang dilakukan enam bulan sekali, sehingga pelaksanaan program tetap dalam pengawasan dan pengontrolan sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan seluruh penjelasan mengenai kesimpulan masing-masing indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses implementasi program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada kekurangan dalam hal sumber daya manusia, kurangnya sumber daya fasilitas yang memadai. Hal tersebut dpat mengganggu

pencapaian tujuan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi program Blood Jek maka di berikan beberapa saran yang diharapkan menjadi alternatif dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan implementasi Program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang yang akan datang adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. UTD PMI Kabupaten Lumajang sebaiknya menambahkan petugas pengantar darah dalam program Blood Jek, agar pelaksanaan program Blood Jek bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Petugas Blood Jek yang diterima harus memiliki kualitas dan berasal dari lulusan program yang sesuai.
2. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana, sarana pada penambahan sepeda motor guna untuk pengantaran darah ke Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan program Blood Jek di UTD PMI kabupaten Lumajang. Untuk prasarana gedung dilakukan renovasi agar bangunannya bisa memenuhi standard luas bangunan UTD.
3. Dilakukan sosialisai lagi dalam hal formulir permintaan darah ke Rumah Sakit yang bekerja sama dengan program Blood Jek di UTD PMI Kabupaten Lumajang, agar tidak ada kesalahan dan kelalaian untuk mengisi kelengkapan data pasien.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik dan Dosen Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mardalis. 2009. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposa* Edisi 11. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi

Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Palayanan Transfusi Darah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 91 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Transfusi Darah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah

Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugandi, Yogi. 2011. *Administrasi Publik; Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat keputusan Kepala UTD PMI Kabupaten Lumajang Nomor 008/02.06.33/UTD/I/2016 Tentang Pelayanan Distribusi Darah.

Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit AIPI Bandung: Puslit KP2W lemlit UNPAD